

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2020).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004)
- Anne Gracia, dkk., *Mendidik Anak di Era Digital* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018)
- B. Duinkerken, *Notariaat in Overgangstijd 1796–1642* (Deventer: Kluwer, 1988)
- C. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983).
- Dr. Muh. Afid Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang : Penerbit Yoga Pratama, 2024)
- Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran* (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).
- Ikatan Notaris Indonesia, *Peran dan Visi Ikatan Notaris Indonesia: Menghadapi Revolusi Industri 5.0* (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2023-2026).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- M. Tajuddin, D. Supatmiwati, S. Hidayat, and A. S. Anas, *Digitalisasi* (Jakarta: Media Nusa Creative, 2022).
- Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan* (Bandung: Penerbit Alumni, 1996).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Mendatang, cet. 2* (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2009).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024)
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999).
- Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)* (Jakarta: Radja Grafindo, 2021).
- _____, *Teknik Pembuatan Suatu Akta* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).
- Universitas Pelita Harapan, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, No.

062/SKD/FH-UPH/VII/2024 (Karawaci, Tangerang: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, 2024).
Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

Jurnal:

- Derry Angling Kesuma, "Kontrak Elektronik dalam Perdagangan Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Papatung* 1, no. 3 (2018): 19–26.
- Mohamat Riza Kuswanto, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia," *Repertorium* 4, no. 2 (2017): 65.
- S. Abdillah, "Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Pasal 51 KUHP," *Journal of Education Research* 4, no. 1 (2023): 67–72
- Sinardi Syawal S. Siagian, *Legalitas Cyber Notary dan Tandatanganan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham* (Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2023)

Peraturan Perundang-Undangan:

- KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN 2024 (1), TLN (6905): 21 hlm.; jdih.setneg.go.id.)
- Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (LN.2014/No. 3, TLN No. 5491, LL SETNEG: 31 HLM)
- Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN.2007/NO.106, TLN NO.4756, LL SETNEG : 82 HLM)
- Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (LN. 2009/ No. 152 , TLN NO. 5071, LL SETNEG : 52 HLM)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (LN. 2012 No. 53, TLN No. 5286, LL SETNEG : 84 HLM)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (LN.2021/No.15, TLN No.6617, peraturan.go.id : 349 hlm.)
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) (LN.2021/No.3, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik. (BN.2022/No.98, peraturan.go.id: 10 hlm.)

Website:

Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris," Hukumonline, diakses 1 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-Notaris-lt5cd238184b299/>.

Penyelenggara Sertifikat Elektronik," Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, diakses 1 Desember 2024, <https://tte.kominfo.go.id/>

What is Contractual Liability?" Elias Y Munoz Abogados, diakses 1 Desember 2024, <https://www.eliasymunozabogados.com/en/blog/what-contractual-liability>.

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik,S.H., Sp.N., M.Kn., Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (“PP-INI”). Pada hari Jumat, tanggal 12 November 2024 pukul 13.00 WIB, di Sekretariat PP-INI, Jl. Minangkabau Timur No. 31 (Jl. Padang Panjang No. 1), Pasar Manggis, Manggarai, Jakarta Selatan.

